

SEMULA DIRENCANAKAN MULAI 22 APRIL

Operasional Bandara JBS Ditunda

PURBALINGGA (KR) - Rencana operasional Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman (Bandara JBS) Purbalingga dimulai 22 April 2021 dipastikan batal.

Tiga alasan pembatalan operasional BJBS adalah, pembangunan terminal belum selesai, ada larangan mudik, dan menyesuaikan waktu Presiden Jokowi bisa meresmikan operasional BJBS.

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi mengungkapkan hal itu usai menyerahkan penghargaan Pemkab kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Purbalingga, Rabu siang (21/4).

"Banyak pihak mengharapkan Bandara JBS diresmikan langsung oleh Presiden. Karena itu, sambil menyelesaikan pembangunan terminal dan melihat perkembangan pandemi Covid-19, kami menunggu

waktu Presiden bisa meresmikan Bandara JBS," ungkap Bupati yang akrab dengan sebutan Tiwi.

Tiwi juga mengungkapkan pihaknya sudah koordinasi dengan Sekretariat Negara, bahwa Pemkab Purbalingga ingin Presiden Jokowi bisa hadir langsung pada peresmian bandara. Bila presiden berkenan meresmikan BJBS, tentu kami yang harus menyesuaikan waktunya," tandasnya.

Prinsipnya, lanjut Tiwi, baik Pemkab Purbalingga maupun Angkasa Pura tetap berkomitmen Bandara JBS bisa beroperasi mulai tahun 2021. Pemkab terus koordinasi dengan BUMN yang menge-

lola bandara tersebut. "Intinya, Angkasa Pura II juga berkomitmen selaras dengan misi pemerintah, operasional Bandara JBS bisa dibuka tahun 2021," ujar Tiwi.

Diakui, progres pembangunan Bandara JBS sela-

ma beberapa waktu terakhir ini terkendala cuaca dan curah hujan ekstrem, sehingga pembangunan lantai terminal belum selesai. Rencananya, setelah lantai terminal siap, akan didirikan tenda sebagai ruang tunggu dan *board-*

ing room untuk penumpang. Rencana operasional bandara JBS pada Kamis 22 April 2021 juga terbentur kebijakan pemerintah tentang larangan mudik dan maskapai tidak penerbangan tidak bisa beroperasi. (Rus)



KR-Toto Rusmanto

Operasional Bandara Jenderal Besar Soedirman ditunda.

DI KABUPATEN BANJARNEGARA Jaringan Internet Dikeluhkan

BANJARNEGARA (KR) - Pembelajaran pendidikan jarak jauh secara daring selama pandemi Covid-19 di Kabupaten Banjarnegara dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan di masyarakat.

"Tidak semua pendidik, siswa serta orangtua siap dalam pembelajaran daring," kata Ketua Komisi II Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2020, Djarkasi saat menyampaikan rekomendasi DPRD di depan rapat paripurna, Selasa (20/4).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Banjarnegara, Ismawan Setya Handoko, Djarkasi mengungkapkan banyak kendala yang dihadapi dalam pembelajaran da-

ring, di antaranya jaringan internet. "Pemkab harus mengusahakan jaringan internet yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Persoalan lain yang juga banyak dikeluhkan siswa adalah keterbatasan biaya untuk mengakses internet," tandasnya.

Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono mengatakan, Pemkab selalu memperhatikan arah kebijakan dan program prioritas. Di antaranya fokus pada pemantapan pembangunan infrastruktur daerah, percepatan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi unggulan daerah, dan pembangunan manusia melalui peningkatan SDM serta peningkatan pelayanan dasar. (Mad)

PAJAK DARI TEMPAT HIBURAN DPRD Kota Tegal Menolak

TEGAL (KR) - DPRD Kota Tegal, bikin gebrakan baru. Sejumlah wakil rakyat itu dengan tegas menolak pengajuan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang di dalamnya memunculkan objek pajak hiburan seperti diskotek, karaoke, klab malam, dan sejenisnya.

Dalam rapat paripurna, Rabu (21/4), DPRD Kota Tegal hanya menerima lima Raperda yang diajukan Pemerintah Kota Tegal. Ketua DPRD Kusnendro menyebutkan, ada kesalahan mendasar dalam penyusunan Raperda tersebut. "Kedudukan Peraturan Walikota dalam tata peraturan perundangan ada di bawah Perda. Peraturan Walikota bukan dasar untuk membuat Perda. Karena itu, hari ini Dewan hanya menerima lima Raperda," ungkapnya.

Ketua Fraksi Partai Gerindra, Sisdiono Ahmad mengaku kaget Raperda itu tetap diajukan, mengingat dalam Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD telah difilter untuk tidak dibahas. "Alasannya, Raperda yang diajukan Pemkot ini keliru landasan hukumnya, sehingga akan terjadi pertentangan satu Perda dengan Perda lain," jelasnya.

Kusnendro mempersilahkan Pemkot Tegal mengajukan kembali Raperda tersebut setelah ada perbaikan, baik redaksi maupun dasar hukumnya. "Juga ada saran-saran yang diberikan Dewan terkait kondisi di lapangan dan harus melakukan kajian terlebih dahulu, tidak hanya asal menghidupkan pajak hiburan," tandasnya.

Anggota Fraksi PKB, Habib Ali Zaenal Abidin menyatakan, apabila Objek Pajak Hiburan disetujui untuk dibahas, Fraksi PKB siap *walk out*. Menurut Habib Ali, Pendapatan Daerah diperoleh tidak harus dari pajak hiburan. Misalnya, dapat dengan memaksimalkan penerapan e-retribusi di pasar-pasar yang ada di Kota Tegal. "Pendapatan dari pajak hiburan tidak sebanding dengan dampak negatif yang akan terjadi. Pemkot dan Dewan akan bertanggung jawab di dunia dan akhirat," tegasnya. (Ryd)

Pasar Bukan Ramadan di Suruh

SEMARANG (KR) - Sebanyak 55 pedagang meramaikan Pasar Bukan Ramadan 1442 H di Kauman Suruh Desa/Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Mereka menjual aneka makanan dan lauk pauk untuk berbuka puasa. Salma Husna selaku anggota panitia mengatakan, pasar di sepanjang Jalan Kiai Rais itu telah digelar sejak Ramadan 2006. Beragam makanan khas Suruh disajikan. Antara lain jemunak, srobi kuah, ketan lupis, puli kecer dan sambal tumpang koyor.

Menurut Ketua panitia Yusuf Bachtiar, Pasar Bukan diselenggarakan oleh Angkatan Muda Kauman Suruh (Amukas). Untuk keperluan kebersihan, setiap pedagang dikenai retribusi Rp 4.000 perhari. Panitia juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat kepada pedagang dan pengunjung. (No)



KR-Agus Sutomo

HARI KARTINI: Puncak peringatan hari lahir pahlawan emansipasi wanita RA Kartini di Kabupaten Rembang, Rabu (21/4), diselenggarakan di Pendapa Pemkab Rembang. Kegiatan lain dilaksanakan sederhana di kompleks makam dan museum RA Kartini. Ini dikarenakan masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang Ir Dwi Purwanto, peringatan antara lain ditandai ziarah, khataman Alquran, dan jamasan pusaka. Peringatan Hari Kartini di Rembang antara lain dihadiri Ny Athikoh Garjar Pranowo bersama organisasi wanita di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

HUKUM

Satpol PP Tertibkan Lapak PKL Liar

TEMANGGUNG (KR) - Sejumlah lapak PKL liar di sekitar Terminal Madureso Temanggung dibongkar paksa oleh Satpol PP karena tidak berizin dan mengganggu keindahan, kebersihan dan ketertiban, Kamis (22/4).

Penertiban tidak ada perlawanan dari pemilik lapak. Barang-barang yang dikira berguna seperti etalase, kursi, meja dan peralatan memasak dimasukkan ke ayas truk yang kemudian diamankan di kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Satpol PP Kabupaten Temanggung.

Kapala Dinas Pemadam Kebakaran dan Satpol PP Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Edy Cahyadi, mengatakan penertiban sebagai upaya penegakkan Perda No 12 Tahun 2011 tentang keamanan, kebersihan, keindahan dan ketertiban. Selain juga memberikan edukasi pada masyarakat agar tidak semau-

nya sendiri mendirikan bangunan seperti lapak-lapak yang mengganggu pandangan mata.

"Bangunan lapak mengganggu pejalan kaki, apalagi ini termasuk kawasan pintu masuk Temanggung. Sehingga ditertibkan," jelasnya.

Diungkapkan, sebelum penertiban, pihaknya sudah melampirkan surat pada pemilik lapak agar membongkar sendiri, namun karena tidak mengindahkan sehingga terpaksa ditertibkan. "Kami menjawab keluhan masyarakat yang terganggu dengan bangunan tersebut dengan pembongkaran," ujarnya.

Edy mengatakan terdapat dua bangunan yang dibongkar. Di bangunan berdasar informasi disinyalir digunakan untuk perbuatan yang melanggar hukum. "Bangunan lain di tempat lain juga akan ditertibkan," tuturnya. (Osy)

Kasus Pengoplosan Gula Rafinasi Terungkap

BANYUMAS (KR) - Tim gabungan Mabes Polri dan Satreskrim Polresta Banyumas Jawa Tengah, mengungkap tindak pengoplosan gula rafinasi dengan molase.

Kapolresta Banyumas M Firman L Hakim, Kamis (22/4), menjelaskan kasus pengoplosan ini melibatkan Gp (40) warga Ajibarang dan Go (40) warga Cilongok Banyumas. "Modusnya pelaku mencampur gula rafinasi 5 ton dengan 25 kg molase. Kemudian dijual dalam kemasan

Rp 50 kg," jelasnya.

Kasus gula rafinasi oplosan tersebut pertama kali diungkap tim Mabes Polri yang selanjutnya diserahkan ke Polresta Banyumas. Dari dua lokasi tersebut, pihaknya berhasil mengamankan gula oplosan sebanyak 35 ton. Saat ini keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Kami akan terus mengembangkan kasus tersebut agar jangan sampai berdampak kepada masyarakat, karena gula rafinasi sangat berbahaya apabila

langsung dikonsumsi oleh masyarakat," ungkapnya.

Firman menjelaskan gula rafinasi tidak boleh langsung dikonsumsi melainkan harus melalui proses industri atau pengolahan lebih dulu. Gula tersebut dijual ke wilayah Jawa Barat dengan harga Rp 11.500/kg. Sebelumnya kedua pelaku membeli gula rafinasi harga sebesar Rp 9.900/kg. Pengoplosan gula tersebut sudah berlangsung sekitar tujuh bulan dengan kuota produksi lebih dari 100 ton perbulan.

Terkait dengan kasus tersebut, kedua tersangka bakal dijerat Pasal 120 ayat 1 UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian jo Pasal 53 ayat 1 huruf b sebagaimana diubah Pasal 44 angka 4 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan/atau Pasal 62 ayat 1 jo Pasal 8 ayat 1 huruf a UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Dri)



KR-Driyanto

Kapolresta Banyumas Kombes Firman bersama Kasat Reskrim Kompol Berry menunjukkan gula rafinasi oplosan.

VIDEO PENANGKAPAN VIRAL

Tujuh Nelayan Penangkap Penyus Jadi Tersangka

SLEMAN (KR) - Petugas Direktorat Polisi dan Air (Ditpolair) Polda DIY mengamankan tujuh nelayan terkait video viral penangkapan satu ekor penyus jenis Le-kang.

Penangkapan penyus dalam video yang diunggah di aplikasi tiktok pada Jumat (26/4) oleh seorang warga Kota Yogya itu, terjadi di Pantai Watulawang Tepus Gunungkidul.

Ketujuh orang yang diamankan merupakan nelayan yang menangkap seekaligus memotong-motong penyus yang rencananya untuk dikonsumsi.

Kasubdit Gakkum Ditpolair Polda DIY, AKBP Fajar Pamuji, menjelaskan ketujuh orang yang diamankan yakni SP (40), SD (38), WS (55), SM (55), WI (36), WS (42) dan IM (47) semuanya warga Tepus Gunungkidul.

Dijelaskan, awalnya petugas Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) DIY berkoordinasi dengan Ditpolair terkait video yang viral tersebut.

"Setelah melakukan pe-

nyelidikan, identitas para pelaku yang ada di video berhasil kami ketahui. Ketujuh orang itu kami panggil untuk dimintai keterangannya dan setelah cukup bukti, status mereka kami naikkan sebagai tersangka," ungkap AKBP Fajar didampingi Kasubdit Penmas Bid Humas Polda DIY AKBP Verena di Mapolda DIY, Kamis (22/4).

Mereka dijerat Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ancaman hukuman maksimal 5 tahun dan denda 100 juta.

Ketujuh orang itu, punya peran masing-masing, ada yang menangkap, membunuh, memotong dan mengangkut daging penyus seberat 15 Kg itu.

Para tersangka menangkap penyus itu de-

ngan cara dipancing. Sebagai barang bukti, polisi menyita pancing, pisau untuk menyembelih, tampar untuk mengikat dan terpal untuk membungkus penyus.

Tersangka SP mengatakan, dirinya tidak mengetahui jika penyus yang ditangkap itu merupakan hewan langka yang dilindungi undang-undang.

Awalnya ia dan teman-temannya mengaku memancing, namun tidak sengaja mendapat penyus yang masuk binatang langka itu.

Kepala Seksi Konservasi Wilayah I BKSDA Provinsi DIY, Untung Surtipri, mengapresiasi Kepolisian dan pengungkap video ke aplikasi tiktok. Dia berharap, makin banyak masyarakat yang peduli dengan keberadaan hewan yang dilindungi.

"Penyus termasuk satwa yang dilindungi. Di Indonesia ada 6 jenis penyus dari 7 jenis penyus yg ada di dunia," tandanya. (Ayu)



KR-Wahyu Priyanti

AKBP Verena meminta keterangan salah atau tersangka.

3 Tersangka Pakai 7 Nomor Seri Upal

KARANGANYAR (KR) - Petugas Satreskrim Polres Karanganyar menangkap dua tersangka peredaran uang palsu, yakni SBH (32) warga Malangjawan Colomadu Karanganyar dan VC (24) warga Cemani Grogol Sukoharjo. Polisi menangkap keduanya dari informasi IS (40), tersangka yang lebih dulu ditangkap.

IS, warga Pancoran, Jakarta Selatan ditangkap di Colomadu pada Senin (5/4). Bermodus membeli rokok, IS mendapat kembalian uang asli di sebuah warung kelontong. Selama sepekan berbelanja dengan upal, IS mendapat untung besar.

Dari keterangan IS, polisi menangkap SBH di salah satu kafe wi-

layah Colomadu. Sedangkan VC ditangkap di rumahnya. Status ketiga tersangka tersebut adalah pedagang upal. IS dan SBH membeli uang palsu dari VC.

"Barang buktinya 22 lembar kertas 100.000 dan 29 lembar kertas 50.000 senilai 3.650.000. Itu dari tersangka IS," jelas Kapolres Karanganyar AKBP Muchamad Syafi Maula, Kamis (22/4).

Polisi juga menyita dua paket upal siap edar. Satu paket berisi 20 lembar kertas 100.000 akan dikirim ke Tangerang. Satu paket lagi berisi 10 lembar kertas 100.000 akan dikirim ke Sidoarjo. Pengiriman dilakukan tersangka dengan jasa ekspedisi.

"Mirip uang asli. Jika tak jeli, orang awam mengira cetakan itu asli. Namun ada kualitas kurang sempurna pada bahan dan permukaan kertas. Lagipula, cetakan upal memiliki tujuh nomor seri identik," ungkapnya.

Polisi menjerat IS dan SBH dengan Pasal 36 ayat (3) UU No 7/2011 tentang Mata Uang. Mereka diancam hukuman kurungan penjara maksimal 15 tahun atau denda Rp 50 miliar.

Satu tersangka lain, VC, terancam Pasal 36 ayat (3) UU No 7/2011 tentang Mata Uang jo Pasal 84 ayat (2) KUHP. Ancaman hukumannya kurungan penjara maksimal 15 tahun atau denda Rp50 miliar. (Lim)